
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dalam menunjang Pengendalian Intern Transaksi *Real Time Gross Settlement* pada Bank Indonesia Bandung

Bambang Rustandi

Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Jl. PHH. Mustofa No. 68 Bandung 40124
e-mail: bamrus@yahoo.co.id

Fitriani Fadilah

Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Jl. PHH. Mustofa No. 68 Bandung 40124
e-mail: fitrianifadilah1@gmail.com

Abstract

*Real Time Gross Settlement (RTGS) is a banking services product in the form of interbank transfers between participant and other parties in a fast, safe and efficient manner that provides certainty. This study was arranged to obtain information is the Accounting Information System that was received by Bank Indonesia Bandung has been able to provide enough Internal Control in managing the RTGS. The study results show that computer-based accounting information system has been able to support internal control RTGS transaction, has achieved the desired results. This is evident from the calculation of the correlation coefficient between the accounting information system with internal control RTGS transaction which shows the coefficient value of $r = 0.8515$. The correlation coefficient value of 0.8515 shows a directional (positive) relationship pattern. Result of hypothesis testing with significance test of coefficient by using *t* test, with degree of confidence equal to 95%, got *t* count equal to 5,855. Based on the results of this test can be concluded that there is a significant role between the accounting information system to the internal control of Real Time Gross Settlement transactions. RTGS internal control at Bank Indonesia Bandung has been able to support the quality of bank services where funds transfer can be implemented quickly. In addition, the applied accounting information system is running well.*

Keywords: *RTGS, Internal Control, Accounting Information System*

Abstrak

*Real Time Gross Settlement (RTGS) merupakan produk jasa perbankan berupa transfer antar bank peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman dan efisien yang memberikan kepastian. Kajian ini disusun untuk memperoleh informasi Apakah sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan Bank Indonesia Bandung sudah mampu memberikan Pengendalian Intern yang cukup dalam mengelola RTGS. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer telah mampu menunjang pengendalian intern transaksi RTGS, telah mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan koefisien korelasi antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian intern transaksi RTGS yang menunjukkan nilai koefisien sebesar $r = 0,8515$. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,8515 menunjukkan pola hubungan searah (positif). Hasil pengujian hipotesis dengan uji keberartian (signifikansi) koefisien dengan menggunakan uji *t*, dengan derajat keyakinan sebesar 95%, didapatkan *t* hitung sebesar 5,855. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern transaksi Real Time Gross Settlement. Pengendalian intern RTGS pada Bank*

Indonesia Bandung telah dapat menunjang terhadap kualitas pelayanan bank dimana transfer dana dapat dilaksanakan secara cepat. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang diterapkan ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci : RTGS, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi

PENDAHULUAN

Terciptanya pengendalian intern dan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dalam suatu perusahaan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu mengamankan harta kekayaan perusahaan, pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasi perusahaan, serta mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu pengendalian intern sangat penting bagi bank sebagai industri jasa keuangan yang mengandal trust. Apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara memadai kemungkinan besar bank tidak akan mengalami perkembangan atau kemajuan bahkan munculnya ketidakpercayaan dri nasabah namun demikian apabila dilakukan dengan sebaik mungkin maka seluruh aktivitas bank akan terkendali dengan baik, sehingga tujuan bank akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Di dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, maka Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perijinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu Sistem Pembayaran Nasional. Pengembangan tersebut direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran. Salah satu jenis pelayanan bank Indonesia adalah **Transaksi Real Time Gross Settlement**

Tulisan ini mencoba menggali informasi mengenai sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian intern transaksi *Real Time Gross Settlement* di Bank Indonesia Cabang Bandung.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. *Real Time Gross Settlement*

Secara umum bank sentral memegang peranan vital sebagai *settlement agent*, pengguna dan atau pengawas (*oversee*) sistem pembayaran. Dalam kaitannya dengan *The Core Prinsiples*, bank sentral bertanggung jawab untuk:

- 1) Menetapkan secara jelas kebijakan bank sentral dalam bidang sistem pembayaran, dan mensosialisasikan peran bank sentral di dalam sistem pembayaran serta berbagai peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran (khususnya *systemically important payment system*).
- 2) Memastikan bahwa sistem pembayaran yang dioperasikan sendiri oleh bank sentral sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam *the core principles*.
- 3) Melakukan pengawasan (*oversee*) terhadap pengelolaan sistem pembayaran oleh pihak-pihak di luar bank sentral (misalnya: penyelenggara kliring swasta) untuk memastikan kesesuaiannya terhadap *the core principles*.
- 4) Menggalang kerjasama antara satuan-satuan kerja internal dengan pihak-pihak di luar bank sentral guna mendukung terciptanya sistem pembayaran yang aman dan handal.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan keamanan serta mempercepat pelaksanaan transfer dana, maka Bank Indonesia (BI) menyediakan fasilitas transfer dana dengan menggunakan sistem *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 yang memberikan definisi :

“ BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual”.

Menurut David B. Humprey (1994: 48), RTGS adalah sebagai berikut :

“ A gross settlement network is one where each payment sent is separately settled at the time it is sent ”.

Sedangkan menurut E.S Hartono (2005: 50), memberikan definisi RTGS sebagai berikut:

“ Real Time Gross Settlement adalah sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronis antar bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Pada dasarnya, Real Time Gross Settlement adalah program yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat real time yang menyajikan sarana transfer antar bank yang lebih handal, cepat, efisien dan aman.”

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa RTGS merupakan sistem transfer dana antar bank yang dilakukan secara elektronik yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi dan bersifat pada waktu yang sesungguhnya dengan tujuan agar transfer dana antar bank dapat dilaksanakan secara cepat, aman dan efisien.

b. Tujuan *Real Time Gross Settlement*

Berdasarkan Surat Edaran No. 2/24/DASP tanggal 17 November 2000, ada beberapa tujuan dari pelaksanaan RTGS yang diterapkan di Bank Indonesia ini, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar Peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman dan efisien.
- 2) Memberikan kepastian pembayaran.
- 3) Memperlancar aliran pembayaran (*payment flows*).
- 4) Mengurangi resiko *settlement* baik bagi peserta maupun nasabah Peserta (*systemic risk*).
- 5) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) bagi Peserta melalui sentralisasi Rekening Giro.
- 6) Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan *early warning system* bagi pengawasan Bank.
- 7) Meningkatkan efisiensi pasar uang.

c. Mekanisme *Settlement* Sebelum Penerapan RTGS

Sebelum penerapan BI-RTGS, mekanisme pembayaran penyelesaian transaksi antar bank baik untuk kepentingan nasabahnya dilaksanakan dengan menggunakan kliring sebagai media. Berbeda dengan sistem RTGS yang menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, tetapi kliring menggunakan metode *net settlement* dalam melakukan penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan *offsetting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu *net* hak atau kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening peserta.

Dengan demikian terdapat risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kesalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar karena selama ini seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transaction* maupun *large value transaction* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kesalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia

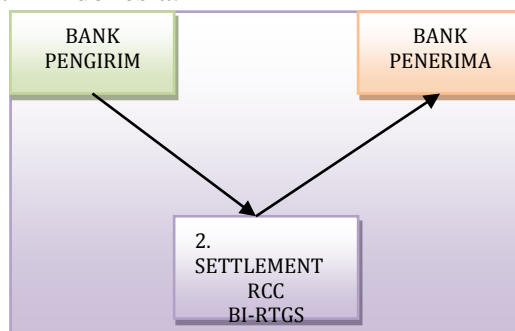
akan menjadi negatif (*overdraft*) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan bank yang bersangkutan apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

d. Karakteristik RTGS

Sistem BI-RTGS merupakan sistem RTGS yang kedelapan yang digunakan oleh Negara-negara di lingkungan EMEAP countries (*Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Bankers*) setelah tujuh Negara lain, yakni: Thailand, Hongkong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Australia dan New Zealand telah terlebih dahulu memberlakukan sistem RTGS. Sehubungan dengan pemberlakuan sistem RTGS pada tahap pertama ini, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Bank-bank yang berkantor pusat di luar Jakarta menjadi peserta BI-RTGS melalui kantor cabangnya di Jakarta. **E.S. Hartono**, (2005: 51-52), menjelaskan beberapa karakteristik sistem BI-RTGS sebagai berikut :

1) Struktur yang berbentuk V (*V-Shaped Structure*)

Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar sistem RTGS di dunia, BI-RTGS juga menggunakan *V-shaped structure* dalam pengiriman pesan dari bank pengirim kepada bank penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-RTGS. Dalam struktur ini, seluruh informasi mengenai suatu transaksi akan dikirimkan oleh bank pengirim kepada RTGS-Central Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada bank penerima apabila transfer sudah diselesaikan oleh Bank Indonesia.



Gambar 1
RTGS V- Shaped Structur

2) Batasan Waktu (*Window Time*)

Batasan waktu pelaksanaan transaksi transfer antar bank baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dimulai pukul 06.30 sampai dengan 17.00 WIB. Batasan waktu ini tersebut diharapkan mempermudah pengguna BI-RTGS di Indonesia mengingat terdapat 3 daerah/bagian waktu. Dalam keadaan tertentu Bank Indonesia dapat memperpanjang batasan waktu untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi bank-bank peserta.

3) Tidak Ada Dana Tidak Ada Transaksi (*No Money No Game*)

Dalam sistem pembayaran melalui BI-RTGS bank-bank diharuskan untuk mengelola likuiditas mereka secara baik agar transaksinya dapat diselesaikan, mengingat apabila rekening bank peserta tidak mencukupi maka transaksinya akan diperlakukan dalam sistem antrian.

4) Maksimal Nilai Transaksi (*Capping*)

Untuk memperkecil berbagai risiko sistem pembayaran sebagai akibat penggunaan *net settlement* dalam proses kliring, maka Bank Indonesia akan menetapkan batas maksimal nilai

transaksi (*capping*) per transaksi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

5) Manajemen Antrian dan Penyelesaian Macet (*Queue Management* dan *Gridlock Resolution*)

Pada saat rekening bank pengirim bersaldo lebih kecil dari jumlah transaksi yang dilakukannya, maka transaksi tersebut akan diberlakukan dalam sistem antrian BI-RTGS dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Sistem antrian BI-RTGS didasarkan pada level prioritas dan *First In First Out* (FIFO).
- b. Antrian akan diselesaikan dengan cara fasilitas *Bypass* FIFO yang beroperasi secara otomatis apabila mencapai jumlah tertentu guna mengurangi jumlah antrian.
- c. Level prioritas antrian sistem BI-RTGS adalah :
 - 1) Hasil dana kliring;
 - 2) Transaksi bank dengan Bank Indonesia/Pemerintah;
 - 3) *Credit* transfer yang berasal dari bank-bank peserta BI-RTGS (ketika sistem BI-RTGS menjadi macet, fasilitas penyelesaian macet akan bekerja secara otomatis dengan didasarkan pada cara manual dengan kriteria ketersediaan dana atau menggunakan cara *First Available First Out*).

6) Fasilitas Likuiditas Intrahari (*Intraday Liquidity Facility/FLI*)

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada sistem BI-RTGS adalah bersifat *gross settlement* sehingga akan di-*settled individually* serta bersifat *continous* (berkelanjutan) sepanjang *window time*. Hal ini berbeda dengan mekanisme kliring saat ini yang menggunakan *net settlement*. Dalam *net settlement* sistem bank tidak memerlukan likuiditas yang cukup tinggi secara terus menerus sepanjang hari. Sedangkan dengan sistem RTGS, bank wajib memiliki likuiditas yang cukup sepanjang hari.

Dalam *gross settlement* dapat terjadi pada suatu waktu tertentu, misalnya pada pagi hari, saldo bank lebih kecil daripada minimal transaksi yang akan di-*settled* yang menyebabkan transaksi tersebut masuk dalam *queue*. Hal ini bukan berarti bahwa bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang kronis, karena pada dasarnya bank tersebut berharap akan menerima *incoming* transfer dari bank lain beberapa saat kemudian dan yang terjadi hanyalah dengan *incoming transaction* pada suatu saat tertentu saja.

Mengenai pentingnya pengendalian intern dalam perbankan, dalam mengembangkan sistem pembayaran khususnya mengenai transaksi *real time gross settlement* perlu diterapkan sistem informasi akuntansi yang baik dan memadai. Sistem ini tentunya harus sejalan dengan dengan penerapan pengendalian intern yang baik dalam pelaksanaan transaksi *real time gross settlement*, agar dapat mengurangi adanya resiko atas operasional yang dijalankan, sehingga tujuan pengendalian intern mengenai keamanan aset, terujinya ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan dan efisiensi operasi RTGS dapat tercapai

e. Prosedur RTGS

Prosedur yang berlaku di Bank Indonesia Bandung merupakan prosedur yang di buat dan di susun berdasarkan kebutuhan bank terinci dengan jelas dalam Surat Edaran Bank Indonesia NO. 2/24/DASP/2000. Hal ini sangat memudahkan karyawan untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai karyawan bank dalam menjalankan operasionalnya.

Mengenai prosedur transaksi RTGS yang diterapkan pada KBI Bandung, dapat dikatakan telah sesuai dalam penerapannya dan dapat mendukung kelancaran operasional transaksi transfer dana. Hal ini sangat menunjang dalam menjalankan sistem pengendalian intern transaksi, sehingga proses *internal check* dan *internal control* dapat dilaksanakan secara otomatis dan sebagaimana mestinya. Usaha-usaha dalam menjalankan prosedur tersebut dapat terlihat dari hal-hal berikut :

- 1) Wewenang otorisasi dalam setiap dokumen yang diolah telah sesuai dengan kewenangan dari petugas atau pejabat yang bersangkutan, seperti :
 - a) Operator melakukan perekaman data transaksi dan memeriksa kebenarannya dari data-data transaksi yang telah direkam, antara lain seperti data pengirim dan penerima dana, tanggal valuta, jenis transaksi, nominal transaksi, *payment detail* dan *member to member information*. Jika semua telah sesuai maka operator akan menandatangani bukti perekaman data transaksi yang telah dilakukan. Penandatanganan tersebut dilakukan pada formulir validasi atau stempel BI-RTGS yang telah disediakan.
 - b) Supervisor melakukan perbandingan antara *construct copy*, warkat asli dan detail transaksi di layar komputer. Lalu supervisor melakukan persetujuan, penolakan atau pembatalan transaksi berdasarkan Nomor BOR. Jika transaksi valid dan dananya mencukupi maka supervisor melakukan *approval* kemudian tahapan-tahapan *approval* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Persetujuan *approval* tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh supervisor pada formulir transaksi dan pada stempel BI-RTGS yang telah disediakan.
 - c) Otorisasi juga dilakukan oleh Manager/Administrator yang menangani transaksi RTGS, Manager/Administrator tersebut bertugas dalam mengawasi dan berperan dalam melakukan persetujuan transaksi ini.
 - d) Stempel BI-RTGS yang telah disediakan dan ditandatangani oleh Manager/Administrator, Supervisor dan Operator sebagai bukti ini bertujuan bahwa transaksi transfer dana ini dapat dilakukan dan dapat *disettle* atau diselesaikan.
- 2) Adanya penggandaan dalam setiap dokumen transaksi BI-RTGS seperti warkat asli di buat rangkap tiga dan adanya perekaman data yang dibuat bukti perekaman datanya yaitu *construct copy* yang kemudian akan terdapat nomor BOR yang secara otomatis diberikan oleh sistem serta setiap formulir transaksi dan warkat asli terdapat nomor urut, hal ini dapat mengurangi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dari setiap petugas atau pejabat yang bersangkutan.

Selain prosedur yang telah ditetapkan dalam mempermudah pengendalian intern, dalam setiap bank atau perusahaan diperlukan adanya kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. Dengan adanya surat keputusan, pimpinan bank atau perusahaan dapat mengendalikan berbagai aktivitas bank atau perusahaan.

Untuk memperlancar jalannya prosedur operasional, maka diperlukan suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga setiap pelaksanaan prosedur operasional transaksi RTGS berpacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Bank Indonesia mengenai transaksi RTGS yang diterapkan dapat dianalisis sebagai berikut ini:

- a. Pengiriman transaksi melalui sistem RTGS wajib menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) sesuai dengan peruntukannya;
Kebijakan penggunaan *Transaction Reference Number* (TRN) ini berfungsi agar terdapat pengelompokan setiap transaksi-transaksi yang berbeda sesuai dengan tujuan pengirimannya dan setiap transaksi RTGS sesuai TRN tersebut dapat dilaksanakan hanya selama jam operasional yang telah ditetapkan oleh BI dengan tujuan dapat meningkatkan pengendalian transaksi transfer dana ini.
- b. Pelaksanaan koreksi atas transaksi, wajib mengikuti standar koreksi yang telah ditetapkan;
Standar koreksi atas transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berfungsi jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan transaksi transfer dana ini dapat menjadi

pedoman untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan perbaikan yang telah dirancang dan ditetapkan.

- c. Pengiriman transaksi melalui transaksi RTGS, wajib mengikuti standarisasi pengisian *message* yang telah ditetapkan;

Di dalam pengiriman transaksi melalui sistem RTGS, Peserta pengirim wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika peserta pengirim tidak mengikuti standar pengisian *message* tersebut, maka peserta penerima berhak untuk mengembalikan transaksi tersebut dan peserta pengirim wajib memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengirimkan kembali transaksi tersebut pada kesempatan pertama. Kebijakan mengenai standar pengisian *message* ini berfungsi untuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan pada sistem RTGS yang kemudian dapat dilanjutkan pada pengolahan data.

- d. Sistem antrian dalam sistem RTGS ini berbasis pada *priority level* dan *First In First Out* (FIFO).

Priority level dalam modul sistem antrian BI-RTGS ini, antara lain prioritas pertama adalah hasil pembebanan kliring; prioritas kedua adalah transaksi bank dengan BI atau pemerintah; dan prioritas ketiga adalah kredit transfer yang berasal dari bank peserta BI-RTGS. Sistem antrian ini akan bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan maksud mengurangi jumlah antrian berdasarkan *priority level* dan FIFO.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan dan prosedur dalam suatu bank sangat mempengaruhi dan membantu manajemen dalam melaksanakan pengendalian intern khususnya dalam transaksi RTGS. Selain itu kebenaran suatu informasi pun dapat terjamin kualitasnya, sehingga informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi khususnya pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya pengendalian intern pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan aktiva pun dapat dikurangi atau dihindari.

METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh atau dibutuhkan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang berhubungan langsung di dalam proses pengujian, dimana data tersebut gunanya untuk membuktikan hipotesis yang telah diambil.

Di dalam memperoleh data yang digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara :

- 1) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan cara langsung menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai data yang diperoleh dan penjelasan yang terperinci.
- 3) Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperlukan sebagai data pendukung dengan mempelajari majalah-majalah, koran-koran, serta siklus-siklus pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis melakukan penelitian dengan cara :

- 1) Studi Kepustakaan
(*Library Research*)

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan teori-teori baik dari buku-buku maupun sumber bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Mengadakan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan yang diteliti guna memperoleh data serta informasi dari keadaan sebenarnya dengan langsung meneliti sumber data atau perusahaan.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah teknik *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis memerlukan data mengenai transaksi RTGS, maka penulis mengambil sampel sumber adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan transaksi RTGS.

Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertutup kepada responden, yang telah disertai alternatif jawaban yang sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban yang tersedia.

Untuk mempermudah dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu berupa kuisisioner. Dimana jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada karyawan bagian transaksi BI-RTGS diberi bobot yang disusun dalam kriteria *Likert*, untuk satu kuisisioner, dengan 3 (tiga) respon jawaban (Ya, Kadang-kadang, Tidak).

Adapun kriteria penilaian atas jawaban hasil kuisisioner disusun berdasarkan skala ordinal (skala *Likert*), yaitu setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban dan masing-masing jawaban diberikan bobot tersendiri, dengan pilihan yaitu

- Jawaban “Ya”, memperoleh bobot 3.
- Jawaban “Kadang-kadang”, memperoleh bobot 2.
- Jawaban “Tidak”, memperoleh bobot 1.

Pada kajian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$ Sistem informasi akuntansi tidak mempunyai hubungan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern transaksi RTGS

$H_1 : \rho \neq 0$ Sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern transaksi RTGS

Selanjutnya yang menjadi kriteria tentang besarnya keeratan hubungan antara variabel yang diteliti yaitu :

Tabel 1
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interprestasi Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2004 ; hal 212)

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Validitas dan Reliabilitas Data

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pertanyaan tersebut mampu mengukur apa yang perlu diukur dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Pada uji validitas ini, dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor pernyataan untuk masing-masing variabel dengan

skor total variabel. Untuk mengetahui tingkat signifikan atau tidaknya item pertanyaan, item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r = 0,3$ dan apabila korelasi kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Pada penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah korelasi *pearson*. Berdasarkan pengujian validitas dari masing-masing variabel yaitu dari 37 pertanyaan untuk variabel X dan Y.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa seluruh item skor pertanyaan yang memiliki r_{hitung} yang lebih besar dari 0,3 . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, yaitu uji reliabilitas maupun uji hipotesis, serta dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui layak tidaknya data dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Langkahnya dengan cara membagi item-item yang valid menjadi dua belahan yaitu, belahan item ganjil dan belahan item genap. Untuk selanjutnya mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X dan Y

Var	Item	Nilai r_{it}	Nilai r_{kritis}	Kesimpulan
1	2	3	4	5
X	.1 - 37	0.90728	0.3	Reliabel
Y	.1 - 37	0.82347	0.3	Reliabel

Sumber : kuesioner (data diolah kembali)

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel X dan Y reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

b. Koefisien Korelasi

Penulis menggunakan formula *Pearson Product Moment* atau *cross product moment* dalam menentukan koefisien korelasi kajian ini dengan formula sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{((n \sum X_i^2)(\sum X_i^2))((n \sum Y_i^2)(\sum Y_i^2))}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui besarnya derajat hubungan antara variabel sistem informasi akuntansi (X) terhadap variabel pengendalian intern transaksi RTGS (Y) adalah sebesar 0,8515 yang menunjukkan koefisien korelasi tersebut positif, maka hubungan kedua variabel tersebut searah, artinya bila variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga naik, begitu juga bila terjadi penurunan. Besarnya korelasi hubungan antara sistem informasi akuntansi (X) terhadap variabel pengendalian intern transaksi RTGS (Y) yaitu sangat kuat.

c. Koefisien Determinasi

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan (korelasi) antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian intern transaksi RTGS di Bank Indonesia Bandung memiliki derajat korelasi sangat tinggi, yaitu sebesar 0,8515 dan besarnya pengaruh kontribusi variabel X terhadap variabel Y dapat dihitung berdasarkan rumus koefisien determinasi, yaitu :

$$Kd = rs^2 \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi di atas, besarnya pengaruh variabel sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern transaksi RTGS adalah sebesar 72,51 %. Pengaruh lain terhadap keberadaan pengendalian intern diluar pengaruh sistem informasi akuntansi adalah sebesar 27,49%,.

Hal ini menjelaskan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pengendalian intern selain sistem informasi akuntansi adalah sebesar 27,49%, dilihat dari hasil nilai tersebut dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding faktor lainnya.

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang penulis tetapkan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui besarnya koefisien korelasi *pearson product moment* (r) sebesar 0,8515 dan jumlah sampel n sebanyak 15. Maka taraf signifikansi untuk tingkat kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%), dk (derajat kebebasan) = 13, dengan hipotesis penelitian :

Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern transaksi RTGS di Bank Indonesia Bandung.

H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern transaksi RTGS di Bank Indonesia Bandung.

Atau dengan notasi statistika

Ho : $\rho = 0$

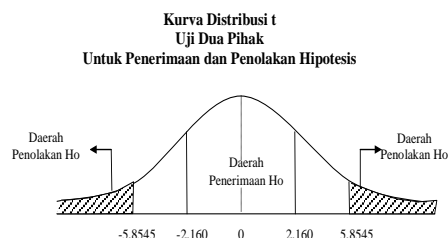
H1 : $\rho \neq 0$

Adapun untuk uji signifikansi dari kedua variabel tersebut, yaitu sebagai berikut:

$$t_{hitung} = rs \sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

$$t_{hitung} = 5,8545$$

Hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel, dengan derajat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (dk = 15 - 2 = 13) didapatkan besar t hitung = 5,8545 dan t tabel = 2,160 atau t hitung > t tabel, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (H1) diterima. Berdasarkan hasil uji sigifikansi diatas, mengisyaratkan bahwa besar koefisien korelasi berada dalam taraf nyata atau perhitungan terhadap sampel dengan derajat kepercayaan 95% (tingkat kesalahan 5%) untuk r = 0,8515 dikategorikan mempunyai peranan yang sangat kuat.



Gambar 2

Dari gambar diatas diketahui bahwa t hitung jatuh di daerah penolakan Ho. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang penulis ajukan bahwa “Apabila pelaksanaan sistem

informasi akuntansi transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) telah memadai maka pengendalian intern terhadap transaksi RTGS terlaksana secara efektif”, dapat diterima.

e. Pembahasan

Dengan demikian, sistem informasi akuntansi berbasis komputer telah mampu menunjang pengendalian intern transaksi RTGS, telah mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan koefisien korelasi antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian intern transaksi RTGS yang menunjukkan nilai koefisien sebesar $r = 0,8515$. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,8515 menunjukkan pola hubungan searah (positif). Hasil pengujian hipotesis dengan uji keberartian (signifikansi) koefisien dengan menggunakan uji t, dengan derajat keyakinan sebesar 95%, didapatkan t hitung sebesar 5,855. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern transaksi *Real Time Gross Settlement*.

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Bank Indonesia Bandung telah dapat menunjang efektivitas pengendalian intern transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Sistem informasi akuntansi transaksi RTGS merupakan organisasi pengelolaan informasi yang berbasis komputerisasi dalam penyelenggaraan transaksi transfer dana yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan bank dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bank. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi di Bank Indonesia Bandung khususnya mengenai transaksi RTGS dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memadai dalam menunjang penyelenggaraan transaksi RTGS ini karena terpenuhinya unsur-unsur sistem informasi akuntansi dalam pengolahan transaksi yaitu *hardware, software, brainware*, prosedur, *database* dan jaringan komunikasi.
- 2) Pengendalian intern merupakan mekanisme tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap transaksi transfer dana antar bank. Secara umum pelaksanaan pengendalian intern di Bank Indonesia Bandung sudah baik dan memadai, hal ini ditandai dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi (*segregation of function*) dan pekerjaan yang tepat, sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan, pelaksanaan yang wajar, kualitas pegawai dan adanya suatu bagian pengawasan intern dimana bagian ini bertugas untuk memeriksa kebenaran, kewajaran dan memastikan pelaksanaan prosedur, kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada telah ditaati oleh setiap pegawai.
- 3) Peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian intern transaksi RTGS di Bank Indonesia Bandung pada umumnya telah memadai karena sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer pada Bank Indonesia Bandung dapat menunjang terhadap kualitas pelayanan bank dimana transfer dana dapat dilaksanakan secara cepat. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang diterapkan ini berjalan dengan baik sehingga membantu manajemen dalam meningkatkan pengendalian intern bank khususnya pengendalian dalam transaksi RTGS.

Meskipun sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan Bank Indonesia Bandung secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan informasi yang baik, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dan di tinjau kembali keberadaannya agar pengendalian intern dapat dilaksanakan secara efektif. Kekurangan tersebut antara lain :

- 1) Seksi atau Bagian RTGS dalam pelaksanaannya terdapat pada Seksi Akunting,
- 2) Pemantauan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian auditing dan badan pengawasan hanya dilakukan secara terprogram.

b. Saran

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas mengenai kekurangan yang ada, maka dapat ditarik suatu saran untuk mengatasi atau mengurangi kekurangan tersebut, saran-saran tersebut antara lain :

- 1) Mengenai penempatan Seksi BI-RTGS sebaiknya terdapat pada Seksi Kliring, karena pada dasarnya transaksi RTGS masih berhubungan dengan transaksi kliring. Atau lebih baik divisi/seksi RTGS penempatannya terpisah dari seksi akunting. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah adanya penyelewengan dan memudahkan pengendalian di dalam pelaksanaan transaksi transfer dana antar bank.
- 2) Mengenai pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh bagian auditing dan badan pengawasan, sebaiknya selain dilakukan secara terprogram, hendaknya juga dilaksanakan secara *surprised* (mendadak), hal ini bertujuan agar meningkatkan kinerja karyawan bank dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, Harun. 1994. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Bandung : Program Pasca Sarjana UNPAD.
- Anthony, Robert N. Dearden, John and Bedford, Norton M. *Management Control System*. Diterjemahkan oleh Agus Maulana MSM. 1995. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Cetakan Pertama. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Arens, Alvin A dan Loebbeck, James K. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf. 2003 *Auditing Pendekatan Terpadu*. Cetakan Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Azhar Susanto dan La Midjan. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi I*. Edisi ke delapan. Bandung : Lingga Jaya. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi II*. Edisi ke delapan. Bandung : Lingga Jaya.
- Bodnar, George H dan Hopwood, Wiliam S. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke enam. Jakarta : Salemba Empat.
- Cushing, Barry E. *Accounting Information System*. Diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih. 1999. *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*. Cetakan Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Hartono, E.S. 2005. Aspek Yuridis Kiriman Uang Lewat RTGS. *Bank dan Manajemen*, 34, 50-52.
- Humphrey, David B. 1995. *Payment Systems: principles, practice and improvements*, Washington : The World Bank.
- IAI, *Standar Profesional Akuntan Publik*. 2001. Cetakan Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Bandung : Alfabeta, CV.
- Susanto, Azhar. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Edisi Kedua. Bandung : Lingga Jaya.

- Theodorus M. Tuanakotta. 1993. *Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Tjukria P. Tawaf. 1999. *Audit Intern Bank*. Edisi Kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- Wilkinson, W. Joseph. *Accounting Information System*. Diterjemahkan oleh Agus Maulana. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. 1993 . Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga.
- Zaki Baridwan. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi kedua, cetakan kelima. Yogyakarta : BPFE.